





TRIBUN JOGJA/AZHA RAMADHAN/IST

SUARAKAN ASPIRASI - Jajaran DPW Partai Ummat DIY saat menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di kantor sekretariat setempat, Selasa (6/9) siang. Insert: Jajaran Fraksi PKS membentangkan poster di sela rapat paripurna Rancangan Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Selasa (6/9).

Fraksi PKS "Tolak Kenaikan Harga BBM" di Tengah Rapat Paripurna

YOGYA, TRIBUN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Yogyakarta menyatakan tuntutanannya kepada pemerintah agar membatalkan kenaikan harga BBM. Tuntutan tersebut disampaikan para anggota Fraksi PKS dengan membentangkan poster, di sela rapat paripurna Rancangan Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Selasa (6/9) siang.

Beberapa poster yang dibentangkan itu bertuliskan "Batalan Kenaikan Harga BBM", hingga "Tolak Kenaikan Harga BBM".

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, mengatakan, pihaknya mengamati perubahan APBD 2022 belum memasukkan unsur kenaikan harga BBM. Padahal, di tengah optimisme kenaikan PAD yang berdasarkan asumsi dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat. Pemkot pun harus

realistis, bahwa implikasi dari kebijakan kenaikan harga BBM akan mempengaruhi jumlah orang yang berwisata karena ongkos transportasi naik.

"Sementara, pariwisata merupakan kebutuhan sekunder yang tentu akan terkena dampak dari menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga, calon wisatawan yang akan menginap, belanja, makan minum pasti berpikir panjang," urainya.

Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan harga BBM dengan alokasi 2 persen yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU), selaras amanat pemerintah pusat, dinilai tidak sepadan dengan imbas yang dirasakan langsung oleh warga masyarakat.

"Karena itu, Fraksi PKS tegas menolak kenaikan BBM, karena akan menghambat upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi," jelasnya.

Sementara itu, DPW Partai Ummat Di Yogyakarta menyatakan tuntutanannya kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Parpol besutan politisi senior Amien Rais itu juga mengajak elemen masyarakat, supaya ikut serta menyuarakan hal tersebut.

Ketua DPW Partai Ummat DIY, Dwi Kuswantoro, berujar, sebagai parpol pendatang baru yang belum memiliki kursi legislatif, pihaknya tetap menempuh upaya konstitusional untuk menyuarakannya. Maka, jika memang dibutuhkan, Partai Ummat pun siap berjuang turun ke jalan.

"Rakyat sangat mengeluh dengan kenaikan harga BBM, mereka merasakan berat, harga bahan pokok terus melejit. Masyarakat kecil paling terdampak," jelasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005